

**KEBERLANJUTAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH
(KOTAKU) DI KOTA PEKANBARU**
(Sustainability of the City Program Without Slums in the City of Pekanbaru)

Oleh: Mahardika Era Islami

Email: mahardikaera@gmail.com

Pembimbing: Dr. H. Rusli SD, M.Si

Program Studi Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

especially by paying attention to the economic, social and environmental concepts. The purpose of this study is to find out how the sustainability of the City without Slums (KOTAKU) program in Pekanbaru City and to determine the inhibiting factors for the sustainability of the City of Slums (KOTAKU) program in Pekanbaru City. This type of research is a qualitative research with a descriptive approach. Data collection obtained both primary and secondary data collected through interviews, observations and documentation and then analyzed so that conclusions can be drawn from the research conducted. The results of this study found that the sustainability of the City without Slums (KOTAKU) program in Pekanbaru City continued in 2019 and continued in 2020.

Keywords: Sustainable Development, KOTAKU Program, Partisipation Society

Pendahuluan

Tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kebutuhan dasar manusia dan hak warga negara Indonesia. Tercantum di dalam Undang-Undang 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan menjadi kewajiban Pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah untuk bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui pelaksanaan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak. Sesuai dengan *amanat PP No 88 tahun 2014, Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman secara berjenjang; dari Menteri hingga*

pemangku kepentingan yang ada di daerah; untuk seluruh aspek perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan;

Di dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, ditegaskan bahwa *penyediaan pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan urusan wajib pemerintah dimana pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten atau Kota merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten atau Kota. Upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh secara kolaborasi tersebut dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang mempertemukan proses perencanaan makro (top down) dan*

perencanaan mikro (*bottom up*). Rencana yang dibuat tidak hanya berdasarkan pada penyelesaian masalah saat ini tetapi harus dilandaskan pada pencapaian visi penataan permukiman untuk mencapai Kabupaten/Kota Layak Huni dan disesuaikan dengan visi Kabupaten atau Kota, Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten/Kota dan rencana pembangunan lainnya.

Keluhan yang paling sering disampaikan mengenai permukiman masyarakat miskin tersebut adalah rendahnya kualitas lingkungan yang dianggap sebagai bagian kota yang mesti disingkirkan. Pemukiman yang tidak layak huni banyak dijumpai di lingkungan padat penduduk seperti Pekanbaru Jakarta, Surabaya, Kalimantan dan kota-kota besar lainnya. Pemukiman yang tidak layak huni ini semakin meningkat karena angka perpindahan penduduk semakin meningkat, sehingga permukiman ini terkesan kumuh dan menimbulkan berbagai masalah diantaranya yaitu sampah dan banjir.

Salah satu cara yang dilakukan untuk menangani kumuh adalah dengan mencegah dan meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Dalam hal ini sesuai Dengan *Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H Ayat 1 menyatakan bahwa, Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.* Ayat tersebut menunjukkan bahwa tinggal di sebuah hunian dengan lingkungan yang layak merupakan hak dasar yang harus dijamin pemenuhannya oleh Pemerintah sebagai penyelenggara negara.

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian bermukim

yang menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan atau memiliki tempat tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 membuat target nasional pada sektor perumahan dan permukiman yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019, yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 ha, tercapainya 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia dan meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak menjadi 100% pada tingkat kebutuhan dasar hingga tahun 2019. Untuk itu, seluruh program di Ditjen Cipta Karya (DJCK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen. PUPR) dalam kurun waktu 5 tahun ke depan akan difokuskan untuk mewujudkan permukiman yang layak huni hingga tercapai 0 Ha kumuh tanpa menggusur.

Oleh karena itu, DJCK menginisiasi pembangunan platform kolaborasi untuk mewujudkan permukiman layak huni melalui Program KOTAKU. Dalam penyelenggaraan program KOTAKU ini akan dinakhodai oleh Pemerintah Daerah dan melibatkan berbagai pihak seperti unsur perguruan tinggi, LSM, pihak swasta dan elemen masyarakat, sehingga Tahapan pelaksanaan program KOTAKU ditingkat Kabupaten/kota secara paralel/serial akan bersamaan dengan tahapan kegiatan program KOTAKU di tingkat kelurahan/desa.

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Propinsi yang menjadi “platform kolaborasi” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya

dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Program KOTAKU disosialisasikan secara nasional oleh Direktur Cipta Karya Kementerian PUPR pada 26 April 2016. Kemudian masing-masing wilayah mensosialisasikan pula ke wilayah masing-masing.

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan program pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) menangani dalam bidang sosial yaitu menangani pembangunan serta penanganan pemukiman kumuh. Dalam bidang ekonomi untuk meningkatkan keberdayaan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan.

Program KOTAKU ini merupakan keberlanjutan dari program sebelumnya yaitu PNPM MP. PNPM Mandiri Perkotaan memiliki tujuan dan sasaran untuk terbangunnya lembaga di tingkat masyarakat yang berbasis nilai universal kemanusiaan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Kemudian meningkatnya akses bagi masyarakat miskin terhadap pelayanan sosial, prasarana hingga pendanaan untuk pengembangan usaha atau permodalan. Selain itu juga untuk mendorong Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kota agar semakin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin.

Perbedaan program PNPM MP dengan program KOTAKU ini adalah pada tujuannya, program KOTAKU bertujuan untuk mencegah dan menangani permukiman kumuh. Sedangkan program PNPM MP ini bertujuan untuk meningkatkan akses sosial untuk masyarakat miskin serta memenuhi kebutuhan masyarakat miskin. Namun kedua program ini juga

tetap bertujuan dan berfokus pada masyarakat miskin, yaitu untuk meningkatkan kehidupan sosial maupun kehidupan ekonomi masyarakat miskin.

Kota Pekanbaru Merupakan salah satu kota di Provinsi Riau dengan luas Wilayah 632,26 Km², dan juga merupakan salah satu kota yang merasakan dampak langsung dari berjalannya program nasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dimulai sejak tahun 2017 hingga 2019 ini, hal tersebut di sebabkan karena Kota Pekanbaru termasuk dalam kategori kota dengan tingkat kumuh yang cukup tinggi mencapai 113,56 Ha, meliputi 8 kawasan dengan 19 kelurahan dan dengan tingkat luasan kumuh yang berbeda-beda.

Tabel 1.1
7 Kawasan Dengan 19 Kelurahan Dan Dengan Tingkat Luasan Kumuh Yang Berbeda-Beda

No	Kawasan	Kelurahan	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Kawasan Kumuh Sungai Sago	Kampung Dalam	Senapelan	5,00
		Sago	Senapelan	1,86
		Kota Baru	Pekanbaru Kota	4,30
		Sukaramai	Pekanbaru Kota	6,60
		Tanah datar	Pekanbaru Kota	6,30
				24,06
2	Kawasan Kumuh Kota Lama	Kampung Bandar	Senapelan	9,50
		Kampung Baru	Senapelan	2,70
		Tirta Siak	Payung Sekaki	3,30
				15,50
3	Kawasan Kumuh Pesisir	Pesisir	Limapuluh	6,40
		Rintis	Limapuluh	9,50
		Tanjung Rhu	Lima Puluh	7,10
				23,00
4	Kawasan Kumuh Meranti	Meranti Pandak	Rumbai Pesisir	4,60
		Sri Meranti	Rumbai	10,40
				15,00
5	Kawasan Kumuh Rumbai Pesisir	Lembah Sari	Rumbai Pesisir	3,90
		Limbungan	Rumbai Pesisir	2,40
		Limbungan Baru	Rumbai Pesisir	8,30
				14,60
6	Kawasan Kumuh Lembah Damai	Lembah Damai	Rumbai Pesisir	13,00
				13,00
7	Kawasan Kumuh Padang Terubuk	Padang Terubuk	Padang Terubuk	5,30
				5,30
8	Kawasan Kumuh Sumahilang	Sumahilang	Pekanbaru Kota	3,10
				3,10
				113,56

Tabel di atas merupakan jabaran dari jumlah keseluruhan kawasan permukiman kumuh yang termasuk kedalam cakupan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Pekanbaru dengan jumlah total 8 kawasan dengan 19 kelurahan. Tabel diatas juga melihatkan berapa jumlah angka capaian kumuh dan angka capaian pengurangan kumuh di 2018 dan 2019, serta sisa kawasan kumuh yang tersisa. Data pengurangan kumuh diatas merupakan dampak dari realisasi program yang berjalan cukup baik sehingga menimbulkan presentase pengurangan yang cukup baik pula perwilayah dalam hitungan pertahunnya.

No	Kawasan	Kelurahan SK Kumuh	Luas Kumuh Kelurahan	Capaian Kelurahan s/d 2018 (Ha)	Capaian Kelurahan (Ha) 2019	Sisa Kumuh
1	KAWASAN SAGO 24.06 HA	KAMPUNG DALAM	5.00	0.44	4.56	0.00
2		SUKARAMAI	6.60	1.83	0.00	4.77
3		SAGO	1.86	1.86	0.00	0.00
4		KOTA BARU	4.30	3.42	0.88	0.00
5		TANAH DATAR	6.30	4.52	0.00	1.78
6	KAWASAN KOTA LAMA 15.50 HA	KAMPUNG BANDA	9.50	2.67	5.53	1.30
7		KAMPUNG BARU	2.70	1.28	0.00	1.42
8	KAWASAN PESISIR 23.00 HA	TIRTA SIAK	3.30	1.57	1.73	0.00
9		RINTIS	9.50	5.39	4.11	0.00
10		TANJUNG RHU	6.40	3.61	2.68	0.11
11	KAWASAN MERANTI 15 HA	PESISIR	7.10	6.40	0.00	0.70
12		MERANTI PANDAK	4.60	1.22	3.37	0.01
13	KAWASAN RUMBAL PESISIR 14.60 HA	SRI MERANTI	10.40	3.48	3.72	3.19
14		LEMBAH SARI	3.90	3.90	0.00	0.00
15	KAWASAN LEMBAH DAMAI 13.00 HA	LMBUNGAN	8.30	7.30	1.00	0.00
16		LMBUNGAN BARU	2.40	1.52	0.00	0.88
17	KAWASAN PADANG TERUBUK 5.30 HA	LEMBAH DAMAI	13.00	1.13	5.22	6.65
18		PADANG TERUBUK	5.30	5.30	0.00	0.00
19	KAWASAN SUMAHILANG 3.10 HA	SUMAHILANG	3.10	0.88	1.41	0.80
JUMLAH			113.56	57.72	34.21	21.63

Kota Pekanbaru sebagai pusat pemerintahan dengan segala fasilitas yang ada membuat segala bentuk aktivitas kehidupan masyarakat terpusat di kota ini, mulai dari segi ekonomi, pemerintahan dan aktivitas sosial kemasyarakatan lainnya. Keadaan ini mengakibatkan tingginya pertumbuhan penduduk rata-rata setiap tahunnya. Dari berbagai wilayah yang ada dalam kawasan Kota Pekanbaru, Kecamatan Pekanbaru Kota mempunyai karakteristik tersendiri dalam

pengembangannya. Hal ini disebabkan wilayahnya terletak di jantung kota dan merupakan pusat dari segala aktivitas, terutama perekonomian.

Banyak factor yang menyebabkan terciptanya kawasan kumuh di perkotaan khususnya Kota Pekanbaru diantaranya :

1. Faktor Urbanisasi dan Migrasi Penduduk
2. Faktor Lahan di Perkotaan
3. Faktor Prasarana dan Sarana Dasar
4. Faktor Sosial Ekonomi

Beberapa Faktor tersebut diatas hanya sebagian kecil dari faktor-faktor penyebab terciptanya kawasan kumuh sehingga dengan adanya masalah terkait kawasan kumuh Kota Pekanbaru, maka pemerintah menetapkan Kota Pekanbaru sebagai salah satu kota yang terdampak sebagai kawasan kumuh dan perlu untuk diatasi dengan memasukkan Kota Pekanbaru kedalam cakupan wilayah program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Seiring berjalannya program yang telah di jalankan di akhir tahun 2016 dan sampai saat sekarang ini peneliti menemukan ada system keberlanjutan program dengan menggunakan teori pembangunan yang berkelanjutan yang berpatokan pada tiga pilar pembangunan antara lain ekonomi, sosial dan lingkungan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui bagaimana keberlanjutan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), khususnya di wilayah Kota Pekanbaru. Sehingga latar belakang masalah yang akan di angkat dan di bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana keberlanjutan program kota tanpa kumuh (KOTAKU) Di Kota Pekanbaru.
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat keberlanjutan program

kota tanpa kumuh (KOTAKU) Di Kota Pekanbaru.

Tujuan Penelitian

Melihat dari rumusan permasalahan diatas maka dapat disebutkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana keberlanjutan program kota tanpa kumuh (KOTAKU) Di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang menghambat keberlanjutan program kota tanpa kumuh (KOTAKU) Di Kota Pekanbaru.

Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini terdiri dari :

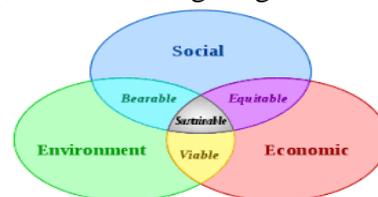
1. Manfaat Akademis
 - a. Dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi pengembangan kegiatan penelitian lebih lanjut dalam kasus yang sama terkait dengan fenomena pemukiman kumuh dengan Keberlanjutan program KOTAKU.
 - b. Dapat memberikan sumbangan ilmiah dan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan social khususnya Ilmu Administrasi Publik.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah agar dapat memberikan perhatian lebih terhadap proses Keberlanjutan program KOTAKU karena di harapkan akan sangat membantu masyarakat yang memiliki masalah dalam bidang perumahan dan permukiman kumuh.

Sebagai deskripsi awal untuk melanjutkan atau mendalami penelitian ini bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Landasan Teori

Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan sebenarnya sejak sudah lama menjadi perhatian para ahli. Namun istilah keberlanjutan (*sustainability*) sendiri baru muncul beberapa dekade yang lalu. Pada konsep Pembangunan berkelanjutan ini, peneliti menggunakan konsep pembangunan yang mengusung konsep *Sustainable Development Goals* atau yang dikenal dengan SDGs yang dimana merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser kearah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosoal, ekonomi dan lingkungan hidup, sehingga peneliti memberikan batasan penelitian dengan menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan yang menggunakan teori *Brundtland 1987* dengan 3 pilar pembangunanya Ekonomi, sosial dan lingkungan.



Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Memang diakui bahwa konsep keberlanjutan merupakan konsep yang sederhana namun kompleks, sehingga pengertian keberlanjutanpun sangat multidimensi dan multi-interpretasi. Menurut Heal, (Fauzi, 2004). Konsep keberlanjutan ini paling tidak mengandung dua dimensi : *Pertama* adalah dimensi waktu karena

keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. *Kedua* adalah dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan.

Strategi Pembangunan Berkelanjutan

Dari berbagai konsep yang ada maka dapat dirumuskan prinsip dasar dari setiap elemen pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini ada empat komponen yang perlu diperhatikan yaitu pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, integrasi, dan perspektif jangka panjang.

a. Pembangunan yang Menjamin Pemerataan dan Keadilan Sosial

Pembangunan yang berorientasi pemerataan dan keadilan sosial harus dilandasi hal-hal seperti ; meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi, meratanya peran dan kesempatan perempuan, meratanya ekonomi yang dicapai dengan keseimbangan distribusi kesejahteraan. Namun pemerataan bukanlah hal yang secara langsung dapat dicapai. Pemerataan adalah konsep yang relatif dan tidak secara langsung dapat diukur. Dimensi etika pembangunan berkelanjutan adalah hal yang menyeluruh, kesenjangan pendapatan negara kaya dan miskin semakin melebar, walaupun pemerataan dibanyak negara sudah meningkat. Aspek etika lainnya yang perlu menjadi perhatian pembangunan berkelanjutan adalah prospek generasi masa datang yang tidak dapat dikompromikan dengan aktivitas generasi masa kini.

b. Pembangunan yang Menghargai Keanekaragaman.

Pemeliharaan keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan

masa datang. Keanekaragaman hayati juga merupakan dasar bagi keseimbangan ekosistem. Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan mendorong perlakuan yang merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti.

c. Pembangunan yang Menggunakan Pendekatan Integratif

Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara yang bermanfaat atau merusak. Hanya dengan memanfaatkan pengertian tentang kompleksnya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial. Dengan menggunakan pengertian ini maka pelaksanaan pembangunan yang lebih integratif merupakan konsep pelaksanaan pembangunan yang dapat dimungkinkan. Hal ini merupakan tantangan utama dalam kelembagaan.

d. Pembangunan yang Meminta Perspektif Jangka Panjang

Masyarakat cenderung menilai masa kini lebih dari masa depan, implikasi pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan yang melandasi penilaian ini. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan dilaksanakan penilaian yang berbeda dengan asumsi normal dalam prosedur *discounting*. Persepsi jangka panjang adalah perspektif pembangunan yang berkelanjutan. Hingga saat ini kerangka jangka pendek mendominasi pemikiran para pengambil keputusan ekonomi, oleh karena itu perlu dipertimbangkan.

Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan

Secara ideal keberlanjutan pembangunan membutuhkan pendekatan pencapaian terhadap keberlanjutan ataupun kesinambungan berbagai aspek kehidupan yang mencakup; keberlanjutan ekologis, ekonomi, sosial budaya, politik, serta keberlanjutan pertahanan dan keamanan.

a. Faktor Lingkungan

Sistem yang berkelanjutan secara Lingkungan harus mampu memelihara sumberdaya yang stabil, menghindari eksploitasi sumberdaya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi.

b. Faktor Ekonomi

Keberlanjutan ekonomi dari perspektif pembangunan memiliki dua hal utama keduanya mempunyai keterkaitan yang erat dengan tujuan aspek keberlanjutan lainnya. Juga diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidak seimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industry.

Pembangunan berkelanjutan dalam konteks sumberdaya yang tidak dapat dipulihkan berarti: pemanfaatan secara efisien sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi masa mendatang dan diupayakan agar dapat dikembangkan substitusi dengan sumberdaya terpulihkan; membatasi dampak lingkungan pemanfaatannya sekecil mungkin, karena sumberdaya lingkungan adalah biosfer, secara menyeluruh

sumberdaya ini tidak menciut akan tetapi berpariasi sesuai dengan kualitasnya.

c. Faktor Sosial

Diartikan sebagai system yang mampu mencapai kesetaraan, menyediakan layanan social, termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik.

Secara menyeluruh keberlanjutan sosial dan budaya dinyatakan dalam keadilan sosial, harga diri manusia dan peningkatan kualitas hidup seluruh manusia. Keberlanjutan sosial dan budaya mempunyai empat sasaran yaitu:

- 1) Stabilitas penduduk yang pelaksanaannya mensyaratkan komitmen politik yang kuat, kesadaran dan partisipasi masyarakat, memperkuat peranan dan status wanita, meningkatkan kualitas, efektivitas dan lingkungan keluarga, terutama dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh (KOTAKU) di Kota Pekanbaru.
- 2) Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kota Pekanbaru, dengan memerangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan absolut. Keberlanjutan pembangunan tidak mungkin tercapai bila terjadi kesenjangan pada distribusi kemakmuran atau adanya kelas sosial. Halangan terhadap keberlanjutan sosial harus dihilangkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kelas sosial yang dihilangkan dimungkinkannya untuk mendapat akses pendidikan yang merata, pemerataan pemulihan lahan dan peningkatan peran wanita.
- 3) Mempertahankan keanekaragaman budaya, dengan

mengakui dan menghargai sistem sosial dan kebudayaan seluruh bangsa, dan dengan memahami dan menggunakan pengetahuan tradisional demi manfaat masyarakat dan pembangunan ekonomi.

- 4) Mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Beberapa persyaratan dibawah ini penting untuk keberlanjutan sosial yaitu : prioritas harus diberikan pada pengeluaran sosial dan program diarahkan untuk manfaat bersama, investasi pada perkembangan sumberdaya misalnya meningkatkan status wanita, akses pendidikan dan kesehatan, kemajuan ekonomi harus berkelanjutan melalui investasi dan perubahan teknologi dan harus selaras dengan distribusi aset produksi yang adil dan efektif, kesenjangan antar regional dan desa, kota, perlu dihindari melalui keputusan lokal tentang prioritas dan alokasi sumber daya.

Paradigma Keberlanjutan yang ditawarkan

Sebagai konsep sederhana namun mencakup dimensi yang cukup luas, pencarian konsep keberlanjutan yang memenuhi harapan semua pihak akan terus berjalan. Pengembangan konsep dan model-model yang telah ada diharapkan akan selalu muncul. Oleh karena itu pada makalah ini ditawarkan model keberlanjutan melalui multikriteria analisis dampak lingkungan.

Dengan memperhatikan fenomena yang ada maka perubahan paradigma keberlanjutan hendaknya mempertimbangkan aspek berikut :

- a. Perilaku generasi kini tidak dapat sepenuhnya menentukan perilaku generasi mendatang.
- b. Generasi mendatang harus dipastikan memperoleh paling tidak tingkat konsumsi minimum.
- c. Pergerakan harga sumberdaya alam dan hak kepemilikan terhadap konsumsi dimasa mendatang harus ditentukan untuk menghindari eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam masa kini.
- d. Dalam situasi pasar tidak berfungsi, diperlukan intervensi non pasar.
- e. Intervensi yang benar merupakan strategi yang penting untuk menjaga keberlanjutan.

Hal ini sesuai dengan dengan perkembangan lain yang sedang menjadi pemikiran dalam pengukuran keberlanjutan yaitu mempertimbangkan bentuk kapital yang lain, yakni social capital (Pearce dan Barbier, 2000 Faucheux dan O' Connor, 2001) yang menyatakan bahwa social kapital berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi karena faktor-faktor berikut:

- 1) Arus informasi akan lebih cepat bergerak antar agen ekonomi jika social kapital cukup baik.
- 2) Kepercayaan (*trust*) yang menjadi komponen utama social capital akan mengurangi biaya pencarian informasi sehingga mengurangi biaya transaksi.
- 3) Social capital yang baik akan mengurangi kontrol pemerintah sehingga pertukaran ekonomi lebih efisien. Disisi lain, social capital juga dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan *natural capital* dengan cara:
 - a) Mengurangi eksternalitas, karena dengan adanya social capital setiap agen ekonomi harus berpikir dalam melakukan aktivitas yang dapat memberikan

dampak negatif terhadap pihak lain.

- b) Mengurangi tingkat *discount rate* yang tinggi, karena *social capital* yang baik akan memungkinkan pembagian resiko sehingga ketidakamanan individu (*individu insecurity*) dapat dikurangi.
- c) Memecahkan resiko yang ditimbulkan oleh sifat *common property* sumber daya alam karena *social capital* yang kuat akan mengurangi runtuhnya sistem pengelolaan sumber daya alam.

Selain beberapa pemikiran diatas, konsep operasional keberlanjutan masih akan terus berkembang. Namun demikian, dengan memahami esensi dasar seperti yang telah dijelaskan dalam tulisan ini hendaknya kita akan lebih mudah mengikuti perkembangan konsep keberlanjutan dimasa-masa yang akan datang.

Pembangunan

Menurut Siagian (2008:5) pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh secara sadar dan terencana dalam Sernua segi kehidupan dan penghidupan negara yang  dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. Pembangunan Menurut Afilh, Iddin (2010:37), administrasi pembangunan adalah administrasi Negara yang berperan sebagai agen perubahan (*Agen Of Change*) denean tujuan menyukseskan pernbangunan dalam berbagai aspeknya. melalui percncanaan berorientasi pada pelaksanaan, tranfer teknologi, transformasi sosial, pengembangan kapasitas dan partisipasi masyarakat serta pemerataan hasil pembangunan.

Menurut Afiffudin (2010:52-54), definisi pembangunan memunculkan tujuh ide pokok yaitu :

1. Pembangunan merupakan suatu proses.
2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.
3. Pembangunan dilaksanakan secara terencana, baik dari arti jangka panjang, sedang da jangka pendek.
4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan.
5. Pembangunan mengarah kepada modernitas..
6. Modemitas yang ingin dicapai bersifat multidimensional.
7. Pembangunan ditunjukkan pada usaha pembinaan bangsa dan negara.

Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Widjaja (2003:169) pemberdayaan masyarakat adalah tıpayא meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jatı diri, harkat dan martabatnya secara maksimal unluk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Menurut Prijono dan Pranaka dalam Suiistiyani (2004:77) mcngatakan pemberdayaan mengandung 2 makna yaıtu : (1) memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuasaan, atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang atau berdaya, (2) memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu. Suharto (2009:59) pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat.

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat menurut Sulistyani (2004 : 80) adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu.

Dari paparan tersebut dapat kita simpulkan bahwa tujuan pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan dan ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi/layak. Kebutuhan dasar itu mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, kesempatan pengambilan keputusan yang terbatas.

Kemudian ketidakberdayaan adalah melemahnya kapital sosial yang ada di masyarakat (gotong royong, kepedulian, musyawarah, dan keswadayaan) yang pada gilirannya dapat mendorong pergeseran perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan, dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama.

3. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Untuk melakukan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar pendampingan masyarakat, sebagai berikut :

1) Belajar Dari Masyarakat

Prinsip yang paling mendasar adalah prinsip bahwa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat adalah dari, Oleh, dan untuk masyarakat. Ini berarti, dibangun pada pengakuan serta kepercayaan akan nilai dan relevansi pengetahuan tradisional masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalahnya sendiri.

2) Pendamping Sebagai Fasilitator

Masyarakat sebagai Pelaku Konsekuensi dari prinsip pertama adalah perlunya pendamping menyadari perannya sebagai fasilitator dan bukannya sebagai pelaku atau guru. Untuk itu perlu sikap rendah hati serta ketersediaan untuk belajar dari masyarakat dan menempatkan Warga masyarakat sebagai narasumber utama dalam memahami keadaan masyarakat itu. Bahkan dalam penerapannya masyarakat dibiarkan mendominasi kegiatan. Walaupun pada awalnya peran pendamping lebih besar, harus diusahakan agar secara bertahap peran itu bisa berkurang dengan mengalihkan prakarsa kegiatan-kegiatan pada warga masyarakat itu sendiri.

3) Saling Belajar

Saling Berbagi Pengalaman Salah satu prinsip dasar pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat adalah pengakuan akan pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat. Hal ini bukanlah berarti bahwa masyarakat selamanya benar dan harus dibiarkan tidak berubah. Kenyataan objektif telah membuktikan bahwa dalam banyak hal perkembangan pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat tidak sempat mengejar perubahan-perubahan yang terjadi dan tidak lagi dapat memecahkan masalah-masalah yang

berkembang. Namun sebaliknya, telah terbukti pula bahwa pengetahuan modern dan inovasi dari luar yang diperkenalkan Oleh orang luar tidak juga memecahkan masalah mereka.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan seseorang secara sukarela tanpa dipaksa sebagaimana yang dijelaskan Sastropoctro dalam Lugiarti (2004:43) bahwa partisipasi adalah keterlibatan secara spontan dengan kesadaran disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan.

Menurut Mubyarto dalam Lugiarti (2004: 68), partisipasi sebagai kesadaran untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Partisipasi Sangat penting dalam pembangunan, karena pembangunan merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Dalam pembangunan seperti itu sangat dibutuhkan pelibatan orang sebanyak mungkin. Sehingga tanpa partisipasi dari sleuruh masyarakat pembangunan sukar dapat berjalan dengan baik. Partisipasi merupakan masukan dalam proses pembangunan dan sekaligus menjadi keluaran atau sasaran dari pelaksanaan pembangunan.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Pendapat lain dari Huneryear dan Hecman dalam Dwiningrum (2011:51)

adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggung jawab bersama mereka. Untuk merumuskan dan menentukan jenis program pembangunan yang bermanfaat dan paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat dilakukan berdasarkan pada prioritas peringkat kedua dan peringkat yang lebih rendah. Penentuan jenis program yang disusun telah dilakukan melalui sosialisasi, wawancara dan diskusi di tingkat desa-desa dan kecamatan, setelah membandingkan dengan program lain dan menggunakan kriteria yang terukur. Selanjutnya kegiatan sosialisasi, perbandingan dan penguatan kelembagaan secara rinci, untuk menentukan program yang akan di bangun di desa atau kecamatan setempat agar sesuai dengan kebutuhan, maka harus di dahului dengan kegiatan sosialisasi kepada anggota masyarakat terutama kepada mereka yang berkaitan secara langsung dengan pembangunan program tersebut materi sosialisasi.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif. **Bogdan & Taylor** dalam **Moeloeng (2007:4)** mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru, serta pada kantor unit Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di jalan Lumba-lumba Ujung Kota Pekanbaru. Untuk lokasi

Keberlanjutan Program peneliti mengambil 3 kawasan diantara 8 Kawasan yang ada yaitu kawasan Sago, Kawasan Pesisir, kawasan Meranti.

Teknik Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan *sample* didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih sangat memiliki kriteria sebagai *sample*).

Adapun informan yang dapat di mintai keterangan mengenai data yaitu :

1. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Kepala Sub Bagian Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman .
3. Tim Koordinator Kota Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
4. Koordinator LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) Tunas Karya Kelurahan Pesisir.
5. Ketua RT/RW Kelurahan Pesisir.

Jenis Dan Sumber Data

Data primer dalam penelitian ini diperoleh penulis melalui wawancara secara langsung dengan informan. Sedangkan data sekunder dapat diperoleh dari buku, laporan, jurnal, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian sebagai penunjang kelengkapan dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga metode, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Pengolahan dan analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dilakukan untuk mengidentifikasi

Keberlanjutan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kota Pekanbaru. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang didasarkan data deskriptif dari status, keadaan, sikap, hubungan atau sistem pemikiran suatu masalah yang menjadi objek penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Keberlanjutan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kota Pekanbaru

Mengingat keragaman tujuan dan keinginan masyarakat dalam keberlanjutan program KOTAKU tanpa mengesampingkan aspek-aspek yang dapat membantu mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat yaitu, Aspek ekonomi, social dan lingkungannya. Apabila aspek ekonomi, social dan lingkungannya semakin membaik maka dapat dikatakan berhasil program, sehingga program dapat dilanjutkan dengan diaplikasikannya konsep Sustainable Development Goals (SDGs) atau yang disebut dengan aspek pembangunan yang berkelanjutan. Sebaliknya jika aspek ekonomi, social dan lingkungannya tidak ada perubahan atau menjadi semakin buruk maka program tersebut dapat dikatakan gagal atau tidak berhasil. Dari hasil wawancara selama observasi dapat diketahui bahwa dalam penetapan rencana pembangunan hingga sampai pada tahap pengambilan keputusan, pada keberlanjutan program KOTAKU berjalan dengan lancar. Walaupun ada beberapa hambatan, akan tetapi tidak menghentikan keberlanjutan program KOTAKU tersebut dalam menjalankan proses pelaksanaan yang berkelanjutan. Tidak hanya melakukan penelitian dengan Koordinator program KOTAKU akan tetapi sebelumnya peneliti juga sudah melakukan penelitian pada Dinas Kawasan Perumahan Dan Permukiman Kota Pekanbaru.

Sehingga pada akhirnya peneliti menetapkan teori yang akan digunakan yaitu teori **Brundland (1987)** tentang Pembangunan Berkelanjutan yang dimana mengatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah “*Pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya*” dengan memperhatikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan yakni, ekonomi, sosial dan lingkungannya.

Faktor Penghambat Keberlanjutan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kota Pekanbaru.

Partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam menerima dan melaksanakan realisasi keberlanjutan program sangatlah di butuhkan, karena pada dasarnya tujuan program adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh
2. Menurunnya luasan permukiman kumuh
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Hal inilah yang menjadikan partisipasi masyarakat yang dapat menjadi salah satu faktor penghambat berjalannya realisasi program sampai dengan akhirnya pada keberlanjutan program, sehingga fasilitator program KOTAKU melakukan tindakan cepat dalam mengatasi apa saja yang dapat menjadi factor penghambat pelaksanaan keberlanjutan program KOTAKU.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang membahas bagaimana partisipasi masyarakat yaitu tentang kehadiran masyarakat dalam

sosialisasi atau rapat yang di laksanakan pihak KOTAKU yang dimana banyak masyarakat tidak bisa hadir dalam rapat ataupun sosialisasi dikarenakan faktor pekerjaan maka, ternyata pihak KOTAKU mempunyai solusi untuk menindak lanjuti kehadiran masyarakat yang di sebabkan masalah pekerjaan diantaranya dengan melakukan rapat pada waktu luang masyarakat yaitu berkisaran pada waktu setelah maghrib sampai setelah isya dan iru di khususkan kepada bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga.

Penutup

Kesimpulan

Program keberlanjutan ini mengarah kepada konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) Brundland (1987) dan kemudian memperhatikan konsep Lingkungan, ekonomi dan social masyarakatnya, dan kemudian dijadikan pembanding tingkat keberhasilan sebelum dan sesudah diadakannya program. Dan berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah peneliti lakukan dan telah dianalisis pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

Program keberlanjutan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Pekanbaru berjalan dengan lancar dari awal program hingga 2019 dan kemudian dilanjutkan di 2020 ini dan di rencanakan akan terus di lanjutkan hingga mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) sesuai dengan RPJPN dengan tetap memperhatikan konsep Sosial, ekonomi dan lingkungannya.

Akan tetapi dalam melaksanakan keberlanjutan program kota tanpa kumuh tersebut ada juga faktor penghambat yang dapat mengancam keberlanjutan program yaitu partisipasi masyarakat.

Saran

Untuk Keberlanjutan Program diharapkan konsistensi pelaksanaan program baik LKM maupun KSM perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat agar mereka memahami dan mengetahui program tersebut dan untuk mensejahterakan masyarakat banayak melalui keberlanjutan program KOTAKU yang aktif dan tetap menghimbau masyarakat permukiman kumuh agar selalu cinta terhadap lingkungan layak huni.

1. Mengadakan rapat terkait program KOTAKU pada waktu yang dikiranya memungkinkan untuk seluruh masyarak terkait agar dapat hadir dalam pelaksanaan rapat tersebut,
2. Komunikasi antar pemangku kepentingan, masyarakat dan aparat kelurahan haruslah saling terjaga.
3. Pemangku Kepentingan mulai dari kelurahan hingga kecamatan disarankan agar lebih sering membuka forum diskusi di wilayahnya terkait informasi-informasi terkini tentang keberlanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Afiffudin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep Teori Dan Implikasinya Di Era Reformasi*. Alfabea : Bandung.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Amri, Nurmaida. (2013). *Karakteristik Lingkungan Permukiman Kumuh Tepian Sungai Kecamatan Kolaka Sulawesi Tenggara*, *Jurnal Jupiter*, vol XII, No.1, Maret 2013
- Ayunda Putry, *Pengertian dan Pemberdayaan Masyarakat Menurut Para Ahli* (<http://specialpengetahuan.blogspot.co.id>.)
- Budiardjo, Miriam. 2004. *Dasar - dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Suyitno. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*. (A. Tanzeh, Ed.). Malang: Akademia Pustaka.
- Creswell, J, W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Heal, G. 1998 *Valuing the Future : Economic Theory and Sustainability*. Columbia University Press. New York.
- Herdiansyah, H. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga
- James A. Christenson, *Pemberdayaan Masyarakat* (<https://id.m.wikipedia.org/wiki.htm>, diakses 3 Desember 2016 jam 20.45 wib) Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Moeloeng, L, J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Redecon, ADB, 1990 *Indonesia Economic Policies For Sustainable Development*, ADB Publication.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sunyoto, Usman. 1998. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*

S.K. Walikota. (2016). Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru No 151 Tahun 2016.

Jurnal:

Fitria, Niken dan Rulli Pratiwi Setiawan. (2014). Identifikasi Karakteristik Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk, *Jurnal Teknik POMITS*, vol 3, ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print)

Nursyamsiyah,S.,Jaya, M.T.B.S, Bakri, S. (2015). Faktor-faktor Yang Menyebabkan Permukiman Kumuh di Kota Bandar Lampung, *Jurnal Sains dan Pendidikan*, vol 2, No.1, 25-39

Putri, Dwi, Lusi. (2018). Potensi Pengembangan Utilitas Wilayah Kumuh Di Kelurahan Muara Faja Kota Pekanbaru.

Putri, L. D. (2017). September 4. *Kolaborasi Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Pekanbaru*. Retrieved from osf.io/thp9k

Putro, J.D. (2011). Penataan Kawasan Kumuh Pinggiran Sungai di Kecamatan Sungai Raya, *Jurnal Teknik Sipil UNTAN*, vol 11, No.1 Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang No.1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*, Lembaran Negara RI Tahun 2011, No 7, Sekretariat Negara RI

Rahayu, Jani, Murtanti; dkk (2007). Strategi Perencanaan Pembangunan dan Permukiman Kumuh Kasus Pemukiman

Bantaran Sungai Bengawan Solo, Surakarta.

Sumber Lain :

Buku Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 151/tahun 2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 189 tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru.

Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 878/tahun 2017 Tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 151 tahun 2017 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru.

Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Cipta Karya Nomor : 40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh.